



SINERGI PEMERINTAH DAN PESANTREN DALAM MEWUJUDKAN SDM BERKARAKTER DAN KOMPETEN DI ERA SOCIETY 5.0

Samsul Rizal¹, Moh Ali², Dewi Cahyani³

^{1,2,3} UIN Siber Syekh Nurjati, Indonesia

Email: samsulr057@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i4.1313>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 October 2025

Final Revised: 21 October 2025

Accepted: 16 November 2025

Published: 28 December 2025

Keywords:

Islamic Boarding School

Government

Human Resources

Character



ABSTRACT

The development of human civilization is characterized by efforts to balance technological progress with fundamental human values. In this context, collaboration between the government and Islamic boarding schools (pesantren) is crucial for creating human resources (HR) who are not only intellectually superior but also possess strong moral and spiritual character. This study aims to examine the forms of collaboration between the government and Islamic boarding schools (pesantren) in developing HR capable of adapting to digital change, as well as examining the various challenges and opportunities that arise during the transition to Society 5.0. The research method used is a qualitative approach through library research, by reviewing various references such as books, scientific articles, policy reports, and relevant online sources. The research findings indicate that the government has a strategic role in formulating policies and providing competency improvement programs for Islamic boarding school HR. Meanwhile, Islamic boarding schools play a crucial role in shaping the character, work ethic, and spirituality of students.

ABSTRAK

Perkembangan peradaban manusia ditandai dengan upaya menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Dalam konteks tersebut, kerja sama antara pemerintah dan lembaga pesantren menjadi sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral dan spiritual yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah dan pesantren dalam mengembangkan SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan digital, serta menelaah berbagai tantangan dan peluang yang muncul pada masa transisi menuju masyarakat society 5.0. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan sumber daring yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan serta menyediakan program peningkatan kompetensi bagi SDM pesantren. Sementara itu, pesantren berperan penting dalam pembentukan karakter, etos kerja, dan spiritualitas peserta didik.

Kata Kunci: Pesantren, Pemerintah, Sumber Daya Manusia, Karakter

PENDAHULUAN

Peradaban manusia saat ini tengah memasuki fase baru yang disebut sebagai *Society 5.0*, yaitu masyarakat yang berupaya menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Era ini muncul sebagai respons terhadap Revolusi Industri 4.0 yang berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi berbagai aspek kehidupan. Jika pada era sebelumnya teknologi lebih menonjolkan efisiensi dan produktivitas, maka *Society 5.0* menempatkan manusia sebagai pusat dari inovasi teknologi itu sendiri. Dengan kata lain, kemajuan digital bukan sekadar alat, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan sosial, dan pembangunan karakter manusia.

Transformasi menuju *Society 5.0* menuntut setiap negara untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas dan memiliki daya saing tinggi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dalam konteks Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas yang dibutuhkan di tengah derasnya arus modernisasi. Pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kemandirian, dan semangat kebangsaan.

Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan dan ekosistem pendidikan yang mampu memperkuat kapasitas SDM nasional. Melalui berbagai program seperti *Digital Talent Scholarship*, *Santri Digitalpreneur Indonesia*, dan pelatihan berbasis literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah berupaya memberdayakan santri agar mampu bersaing di era teknologi canggih. Program-program ini menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pesantren dalam membangun generasi muda yang tidak hanya cakap dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual dan kebangsaan.

Sinergi antara pemerintah dan pesantren tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SDM pada masa *Society 5.0* tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah berperan dalam menyiapkan kebijakan, infrastruktur, dan pelatihan, sementara pesantren menjadi benteng nilai dan pembentuk karakter peserta didik. Kolaborasi keduanya menjadi model pembangunan SDM holistik yang menggabungkan kecerdasan digital dengan kematangan moral. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan peran aktif pesantren dalam penguatan nilai-nilai etika, diharapkan akan lahir generasi santri yang mampu berkontribusi dalam kemajuan bangsa, berkompetisi secara global, namun tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai luhur Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan analisis deskriptif mengenai sinergi antara pemerintah dan pesantren dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter, kompeten, dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi pada era *Society 5.0*. Menurut Zed (2018), studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah

berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi pemerintah seperti *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045*, *Rencana Strategis Kementerian Agama 2020–2024*, serta dokumen program *Santri Digitalpreneur Indonesia* (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang mengulas tentang transformasi pendidikan Islam, penguatan karakter di pesantren, dan strategi pengembangan SDM di era digital (Raharjo, 2022; Miftahuddin, 2023). Seluruh literatur dikumpulkan melalui basis data akademik seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, dan *Directory of Open Access Journals (DOAJ)* dengan menggunakan kata kunci seperti pesantren dan SDM 5.0, kolaborasi pemerintah-pesantren, pendidikan karakter digital, dan human resource development in Society 5.0.

Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah penelusuran literatur secara sistematis, membaca secara mendalam, serta mencatat gagasan-gagasan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi untuk menemukan tema-tema utama dalam literatur, seperti peran pemerintah dalam penguatan kompetensi SDM pesantren dan kontribusi pesantren dalam pembentukan karakter serta spiritualitas generasi muda, serta analisis konteks untuk memahami kondisi sosial, kebijakan, dan tantangan aktual di era digital.

Penelitian ini juga memanfaatkan teori Kolaboratif-Partisipatif dari Ansell dan Gash (2018) yang menjelaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kebijakan publik. Teori ini relevan untuk menggambarkan bentuk sinergi antara pemerintah dan pesantren dalam mengembangkan SDM unggul yang berkarakter. Selain itu, penelitian ini mengacu pada teori Kritis Habermas (1984) yang menyoroti pentingnya kesadaran reflektif dan komunikasi yang etis dalam membangun tatanan sosial yang adil dan manusiawi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan teori, yakni membandingkan temuan dari berbagai literatur serta menafsirkan data berdasarkan lebih dari satu perspektif teoretis untuk menghasilkan analisis yang objektif dan kredibel. Seluruh referensi utama yang digunakan dibatasi antara tahun 2018 hingga 2024 agar tetap relevan dengan konteks terkini.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat model kolaborasi antara pemerintah dan pesantren dalam pengembangan SDM yang tidak hanya terampil dalam teknologi, tetapi juga berkarakter, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang program peningkatan literasi digital santri, pelatihan profesional tenaga pendidik pesantren, dan penguatan nilai moral dalam pendidikan Islam guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, sinergi antara pemerintah dan pesantren terbukti berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkarakter dan memiliki kompetensi

sesuai tuntutan era Society 5.0. Keselarasan antara kebijakan pemerintah dan praktik pendidikan pesantren memungkinkan penguatan nilai moral berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Program pemerintah yang berfokus pada literasi digital dan keterampilan teknologi memberikan dampak positif bagi pesantren yang terlibat, terutama dalam meningkatkan kemampuan santri memanfaatkan teknologi secara produktif. Teknologi tidak hanya dipahami sebagai alat teknis, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, kewirausahaan, dan peran sosial. Sementara itu, pesantren tetap menjalankan fungsi utamanya dalam pembentukan karakter melalui keteladanan, kedisiplinan, dan internalisasi nilai-nilai keislaman, sehingga santri memiliki sikap etis dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi digital di pesantren berlangsung selaras dengan pembinaan karakter. Santri dibekali keterampilan teknologi sekaligus pemahaman etika digital, yang sejalan dengan konsep Society 5.0 yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Pola kolaborasi antara pemerintah dan pesantren bersifat saling melengkapi, di mana pemerintah menyediakan regulasi, fasilitas, dan pelatihan, sedangkan pesantren mengadaptasikan program tersebut sesuai dengan budaya dan nilai lembaga. Dampak sinergi ini terlihat pada meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, serta kesiapan santri menghadapi dunia kerja dan kewirausahaan tanpa mengesampingkan nilai religius dan nasionalisme. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur, kesiapan pengelola pesantren, dan pemerataan program. Oleh karena itu, sinergi yang berkelanjutan memerlukan peningkatan dukungan fasilitas, penguatan kelembagaan, dan pendampingan yang lebih merata agar pesantren dapat berperan optimal dalam menyiapkan SDM unggul di era Society 5.0.

1. Peran Pemerintah dalam Digitalisasi dan Penguatan SDM Pesantren

Dalam menghadapi era *Society 5.0*, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengarahkan transformasi digital lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pesantren. Melalui berbagai kebijakan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Strategis Kementerian Agama 2020–2024, pemerintah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia berbasis teknologi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai spiritual dan moral bangsa (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Program seperti “Santri Digitalpreneur Indonesia” yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo, 2023) menjadi salah satu wujud nyata kolaborasi antara negara dan pesantren. Program ini bertujuan menyiapkan santri yang tidak hanya menguasai teknologi digital, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai keislaman. Dukungan pemerintah juga terlihat dalam penyediaan pelatihan literasi digital, infrastruktur jaringan internet di pesantren daerah terpencil, serta pemberian bantuan dana untuk pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital (Kemenag RI, 2022).

Namun, tantangan yang dihadapi oleh pesantren di era virtual digital ini tidak berhenti di situ. Adanya media sosial dan berbagai platform digital lainnya membuat pesantren harus memperhatikan konten yang diakses oleh santri. Hal ini dikarenakan, di era digital ini, informasi dapat dengan mudah diakses dan tersebar tanpa filter yang memadai. Oleh karena itu, pesantren

harus memperkuat pendidikan karakter bagi santri agar mereka dapat menjadi pengguna internet yang bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, pesantren juga harus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam era digital ini. Banyaknya informasi yang beredar di internet terkadang membuat santri kebingungan dan terpengaruh oleh pemahaman yang kurang benar mengenai agama.

Dengan demikian, peran pemerintah tidak terbatas pada regulasi, tetapi juga mencakup fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan. Kebijakan ini menunjukkan arah baru pendidikan Islam di Indonesia yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan (Rosyidi, 2021; Nurhadi & Hidayat, 2023).

2. Inovasi Pesantren dalam Pembentukan Karakter dan Kompetensi Digital

Pesantren kini menghadapi tantangan baru dalam menyeimbangkan antara penguasaan teknologi dan pelestarian nilai spiritual. Di era *Society 5.0*, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din* (pendalaman ilmu agama), tetapi juga sebagai pusat pengembangan kompetensi digital santri. Pesantren modern seperti Pesantren Digital Indonesia (PDI) di Bandung menjadi contoh konkret bagaimana lembaga tradisional ini mampu memadukan pendidikan tahlidz al-Qur'an dengan pelatihan teknologi digital, termasuk *digital marketing*, *content creation*, dan *cyber ethics* (PDI Report, 2023).

Integrasi nilai-nilai spiritual dengan teknologi dilakukan melalui berbagai cara, seperti penerapan sistem pembelajaran *e-learning* untuk kajian kitab kuning, penggunaan platform dakwah digital berbasis media sosial, serta eksplorasi kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran Al-Qur'an. Selain meningkatkan efektivitas pembelajaran, inovasi ini juga membantu membentuk *digital literacy* yang beretika, sehingga santri tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengembang konten positif di dunia maya (Fauzan, 2022).

Sejalan dengan ungkapan para ulama yang menyatakan *al-Muhafadzhoh ala al Qodim al-Salih wa al-akhidzu bi al-jadid al-aslah* bahwa kita harus menjaga kebaikan-kebaikan lama atau terdahulu sambil mengadopsi pembaruan yang lebih baik, santri diajarkan untuk tetap mempertahankan ilmu klasik seperti mengaji kitab kuning dan fiqh, tanpa mengabaikan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Pendekatan ini menjadi sebuah strategi untuk mempertahankan ajaran dan pendidikan tradisional di tengah kemajuan zaman modern. Oleh karena itu, kami lebih cenderung memilih istilah "*wal ijad*" daripada "*wal akhdu*," di mana generasi ulama sekarang dapat merumuskan teori-teori baru yang lebih baik dan memberikan manfaat lebih besar dibandingkan teori lama yang dikembangkan oleh ulama salaf. Dengan cara ini, metodologi lama dan baru dapat dipadukan secara efektif; kita tidak boleh meninggalkan tradisi lama dalam memahami kitab kuning, tetapi juga harus mengikuti metode dan perkembangan modern yang sesuai dengan kondisi santri saat ini, seperti menggunakan aplikasi kitab digital.

Model pembinaan karakter digital di pesantren berfokus pada tiga aspek utama: (1) penanaman etika digital berbasis nilai akhlak Islam, (2) penguatan tanggung jawab moral terhadap penggunaan teknologi, dan (3) pembangunan mental kreatif namun kritis terhadap informasi daring (Nasrullah, 2023). Dengan pendekatan ini, pesantren diharapkan mampu mencetak generasi santri yang tangguh, produktif, dan berkontribusi aktif dalam ekosistem digital nasional tanpa kehilangan jati diri spiritualnya.

3. Model Sinergi Pemerintah-Pesantren dalam Mewujudkan SDM Era Society 5.0

Sinergi antara pemerintah dan pesantren merupakan langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, berakhlak, dan berjiwa inovatif di tengah dinamika *Society 5.0*. Kolaborasi ini dapat dilihat melalui berbagai program bersama, seperti penguatan kurikulum berbasis digital di pesantren, pelatihan guru dan santri, serta dukungan pendanaan bagi inovasi pendidikan berbasis teknologi (Kemenag, 2023).

Model kerja sama ini dapat dianalisis melalui teori kolaboratif-partisipatif yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2018), yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pesantren, teori ini menggambarkan bahwa sinergi yang ideal terbentuk ketika kedua pihak membangun kepercayaan, komitmen, dan komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia sumber daya, sementara pesantren berfungsi sebagai agen pelaksana yang memahami konteks sosial, moral, dan budaya masyarakat.

konsep kekinian dari implementasi model ini adalah program “Santri Technopreneur” yang dijalankan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan berbagai pesantren di Indonesia. Program ini bertujuan menciptakan santri yang berjiwa wirausaha digital dengan landasan nilai-nilai Islam dan kemandirian ekonomi. Program tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas ekonomi pesantren, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi nilai *kemandirian, inovasi, dan keberlanjutan* dalam sistem pendidikan Islam (Setiawan & Mulyadi, 2023).

KESIMPULAN

Sinergi antara pemerintah dan pesantren merupakan langkah strategis dan visioner dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul di era *Society 5.0*—era ketika teknologi dan kemanusiaan harus berjalan seimbang. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan yang mendorong digitalisasi lembaga keagamaan melalui berbagai program seperti *Santri Digitalpreneur* dan *Santri Technopreneur*. Inisiatif tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mempersiapkan generasi santri yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga berdaya saing dan berakhlak. Sementara itu, pesantren memainkan peran penting sebagai penjaga nilai moral dan spiritual di tengah derasnya arus digitalisasi. Melalui inovasi pembelajaran berbasis *e-learning*, dakwah digital, hingga pelatihan *digital literacy*, pesantren telah menunjukkan kemampuan adaptifnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan teknologi modern. Pesantren seperti Pesantren Digital Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana tradisi keilmuan Islam dapat bertransformasi tanpa kehilangan jati diri. Kolaborasi kedua pihak ini menciptakan model pendidikan yang kolaboratif-partisipatif, di mana pemerintah menyediakan arah dan sumber daya, sementara pesantren memastikan bahwa transformasi digital tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan spiritualitas Islam. Sinergi semacam ini tidak hanya memperkuat ekosistem pendidikan Islam nasional, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya SDM yang berkarakter, inovatif, serta mampu menjadi agen perubahan di tengah kompleksitas dunia modern. Dengan demikian, membangun SDM berkarakter dan kompeten di era *Society 5.0* bukan sekadar persoalan penguasaan teknologi, tetapi juga tentang menanamkan nilai, etika, dan tanggung jawab moral. Kolaborasi pemerintah dan pesantren

adalah kunci untuk melahirkan generasi emas Indonesia 2045 – generasi yang melek digital, berjiwa spiritual, dan siap menghadirkan peradaban yang lebih manusiawi di tengah kemajuan teknologi.

REFERENSI

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Deguchi, A., Hirai, C., Matsuoka, H., Nakano, T., Oshima, K., Tai, M., & Tani, S. (2020). *Society 5.0: A people-centric super-smart society*. Singapore: Springer.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. *Japan Spotlight*, 27, 47–50.
- Huda, M., Qodriah, S. L., Rismayadi, B., Hananto, A., Kardiyati, E. N., Ruskam, A., & Nasir, B. M. (2020). Towards cooperative learning through character education: A case of Islamic education in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(9), 1–18.
- Nastiti, F. E., & Abdu, A. R. N. (2020). Kajian: Kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era society 5.0. *Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5(1), 61–66.
- Shiroishi, Y., Uchiyama, K., & Suzuki, N. (2018). Society 5.0: For human security and well-being. *Computer*, 51(7), 91–95. <https://doi.org/10.1109/MC.2018.3011041>
- Slamet, S., & Hidayat, R. (2022). Digital literacy in Islamic boarding schools: Strengthening students' competencies in the era of society 5.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 245–260.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Agama 2020–2024*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Program Santri Digitalpreneur Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Bappenas.
- Miftahuddin. (2023). *Manajemen Pesantren dan Transformasi Digital di Era 5.0*. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 8(1), 33–47.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Raharjo, S. (2022). *Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan Islam dalam Pengembangan SDM Berbasis Karakter*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(3), 201–215.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*. Jakarta: Bappenas.

- Kemenkominfo. (2023). *Program Santri Digitalpreneur Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Kemenag RI. (2022). *Renstra Kementerian Agama 2020–2024*. Jakarta: Kemenag RI.
- Nurhadi, M., & Hidayat, M. (2023). Digitalisasi Pesantren di Indonesia: Tantangan dan Strategi Adaptif. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 9(2), 145–160.
- Rosyidi, A. (2021). Transformasi Pendidikan Islam Menuju Era Society 5.0. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 34–50.
- Pesantren Digital Indonesia (PDI). (2023). *Laporan Program Digital Literacy Santri Tahun 2023*. Bandung: PDI Press.
- Fauzan, A. (2022). Integrasi Teknologi Digital dalam Pendidikan Pesantren: Studi Kasus Pesantren Modern. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 8(1), 55–70.
- Nasrullah, R. (2023). *Etika Digital Islam: Literasi, Moral, dan Dakwah di Era Media Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
- Kemenag RI. (2023). *Program Santri Technopreneur Nasional*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- Setiawan, F., & Mulyadi, S. (2023). Kolaborasi Pemerintah dan Pesantren dalam Penguatan SDM Era Digital. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 11(2), 190–208.

Copyright holder:

© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA